

# RENCANA

# KERJA

DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP



# 2024

# RENJA

(RENCANA KERJA)

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KOTA PANGKALPINANG**

Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sriwijaya,  
Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang (33143)  
Telepon: (0717) 422876, e-mail: [dlh@pangkalpinangkota.go.id](mailto:dlh@pangkalpinangkota.go.id)

# 2024

# Kata Pengantar

Atas berkah dan hidayah Allah SWT serta didorong oleh semangat pengabdian untuk meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2024.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 merupakan salah satu bagian dari substansi perencanaan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta sinkronisasi dari Perencanaan Strategis Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2024 dilakukan sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah dengan tetap mengedepankan dan mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan bidang kewenangan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Transisi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 – 2026 dengan menyelaraskan kondisi eksisting serta isu-isu strategis yang ada pada saat ini.

Rencana Kerja ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan, program dan arah kebijakan selama jangka waktu 1 tahun, juga akan menjadi acuan untuk evaluasi kinerja melalui pengukuran kinerja Instansi/Organisasi, berdasar pada data realisasi dan tingkat pencapaian target yang dapat dipertanggungjawabkan baik di lapangan (fisik) maupun secara administrasi.

Telah menjadi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu kepada dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini maka diperlukan kesiapan, kemampuan dan profesionalisme aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang yang dilandasi sikap mental, disiplin dan konsisten terhadap perencanaan yang telah ditetapkan.

Sebagai akhir kata, dengan memohon petunjuk dan anugerah Allah SWT, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang senantiasa berusaha melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah tersusun, sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pangkalpinang, April 2023  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Pangkalpinang,



**Bartholomeus Suharto, S.T., M.Si.**  
**Pembina Utama Muda**  
**Nip. 19720824 199803 1 002**

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i	
Daftar Isi.....	iii	
<b>Bab 1</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1	
1.2. Maksud dan Tujuan .....	3	
1.3. Landasan Hukum.....	5	
1.4. Sistematika Penyusunan Renja .....	7	
<b>Bab 2</b>	<b>HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	<b>8</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	15	
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang .....	21	
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang .....	21	
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	35	

<b>Bab 3</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN</b>	<b>36</b>
	3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	36
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD .....	36
<b>Bab 4</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>44</b>
<b>Bab 5</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>62</b>

# BAB 1

# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, maka disebutkan bahwa tugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah mendukung tugas Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup.

Dengan adanya peninjauan kembali terhadap struktur organisasi dan kelembagaan di daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, maka sejak Januari 2017 Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dan Dinas Kebersihan bergabung menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan masuk dalam tipe B. Dinas Lingkungan Hidup atau disingkat DLH mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota di bidang lingkungan hidup.

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi DLH diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung program penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

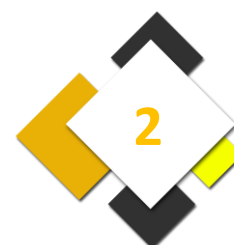
1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).



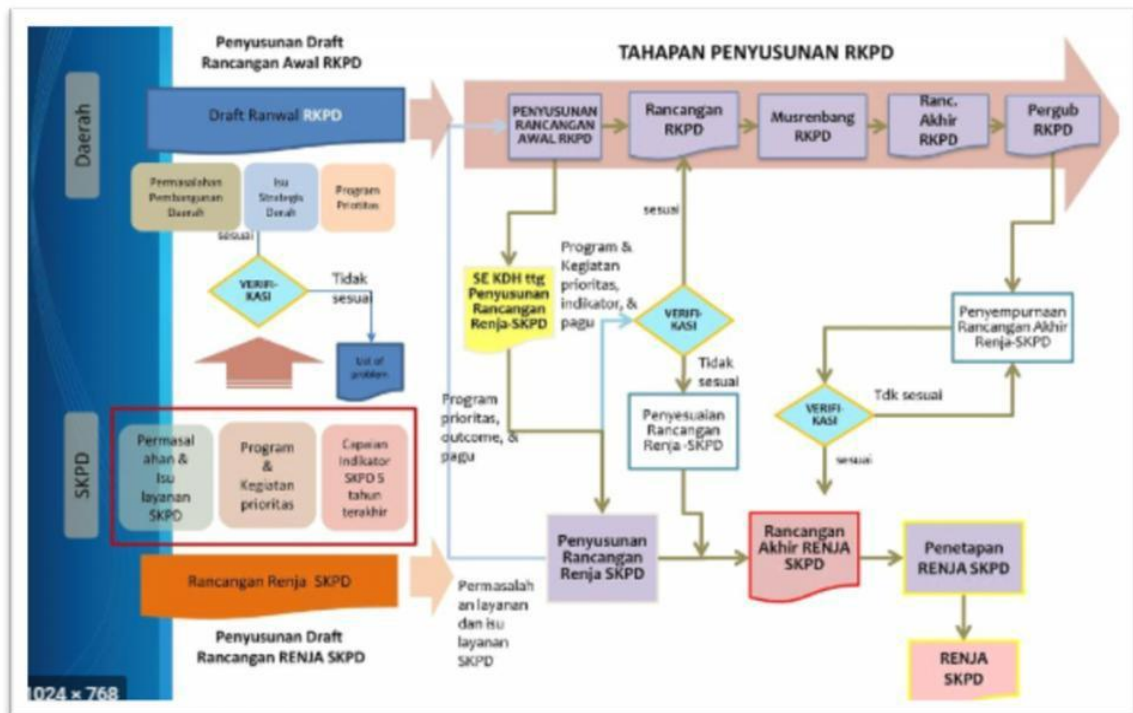
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung program penyelenggaraan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penutupan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan Tahun 2024 berpedoman pada prioritas dan sasaran daerah yang dirumuskan dari:
  - a. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)
  - b. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Pangkalpinang
  - c. RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026
  - d. Renstra Transisi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.



Sejalan dengan prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2024 yakni Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan dengan sasaran prioritas daerah Meningkatkan kualitas lingkungan hidup maka untuk mendukung terlaksananya Sasaran dan kebijakan Strategis Pembangunan urusan wajib Bidang Lingkungan Hidup di Tahun 2024 yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.



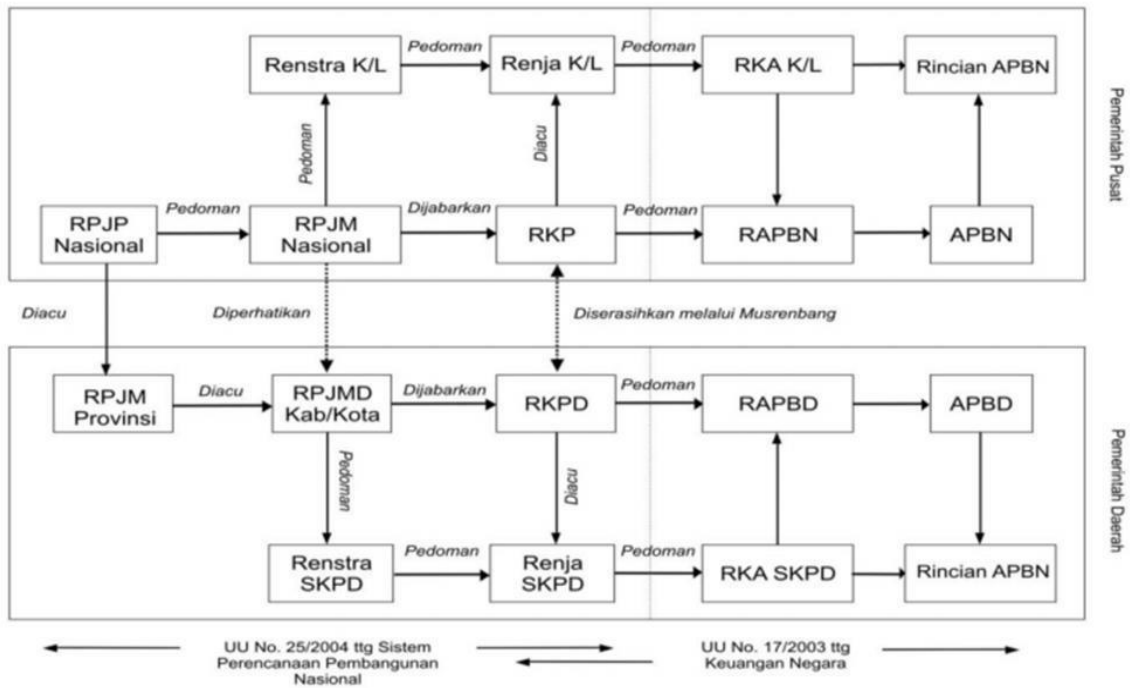
Gambar 1.1. Bagan Alur Rancangan Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang

## 1.2. Maksud dan Tujuan

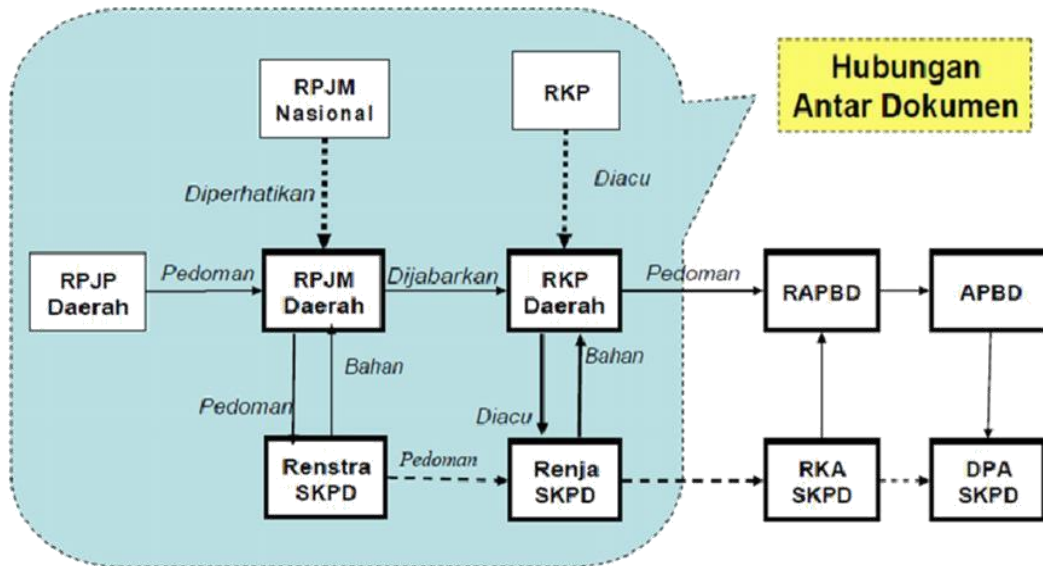
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2024, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.

Skema hubungan perencanaan dan penganggaran seperti terlihat pada bagan di bawah ini:



Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup OPD merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka waktu lima tahunan/ Rentsra Transisi dengan jangka waktu tiga Tahun. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari system perencanaan pembangunan dari proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan-tahapan dan dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan keterkaitan yang antara satu dengan lainnya.



Gambar 1.2 Bagan hubungan antar dokumen perencanaan daerah

### 1.3. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2024, adalah :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- h. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

- Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03 );
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - m. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
  - n. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 2, Seri D Nomor 01);
  - o. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7).

#### **1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (RENJA).**

Sistematika Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2024, meliputi :

- BAB I**           Pendahuluan  
Menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penyusunan.
- BAB II**           Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu  
Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.
- BAB III**          Tujuan, Sasaran, dan Program Kegiatan  
Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan.
- BAB IV**          Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Menjelaskan rencana kerja dan pendanaan.
- BAB V**           Penutup  
Menjelaskan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.



## BAB 2

# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang sampai dengan Tahun 2024 (Tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini:



**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dan Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA)**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang s.d 2024**

**VERSI RENSTRA**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022			Target Program & Kegiatan RKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73	Nilai							0	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	80	Nilai							0	
		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu			100%	100%	100%	100	100%		0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100	%	100%	-	-	-	3 Laporan		0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	100	%	100%	100%	100%	100	4 Laporan		0	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)			100%	100%	100%	100	100%		0	Dinas Lingkungan Hidup



2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD	2,3	%	100%	100%	100%	100	1 Laporan		0	Dinas Lingkungan Hidup
		<b>Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/ Kualifikasi pada unit kerjanya</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>		<b>0</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	0	%	100%	100%	100%	100	1 Laporan		0	Dinas Lingkungan Hidup
		<b>Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>		<b>0</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100	%	100%	100%	100%	100	5 Laporan		0	Dinas Lingkungan Hidup
		<b>Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>		<b>0</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	100	%							0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100%	100%	100%	100	3 Laporan		0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	100	%	100%	100%	100%	100	3 Laporan		0	Dinas Lingkungan Hidup
<b>02.11.02</b>	<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>125</b>	<b>80%</b>		<b>0</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>

2.11.02. 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota	Persentase tersusunnya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota	100	%	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02. 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100	%	-	1 Kali	1 Kali	100	2 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.0 3	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Kualitas air danau</b>			4,52 mg/l	2 mg/l	2,28 mg/l	114	2 mg/l	0	<b>Dinas Lingkung an Hidup</b>
		<b>Kualitas air sungai sebagai sumber air baku</b>			4,67 mg/l	4,27 mg/l	2 mg/l	47	3 mg/l	0	<b>Dinas Lingkung an Hidup</b>
		<b>Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan</b>			2%	3%	2%	67	3%	0	<b>Dinas Lingkung an Hidup</b>
		<b>Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai baku mutu</b>	35	%							0
2.11.03. 2.01	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	4	Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	3 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.0 4	<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>	<b>Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang</b>			21,23%	21,30%	21,30%	100	21,30%	0	<b>Dinas Lingkung an Hidup</b>

		<b>Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati</b>	<b>74</b>	<b>%</b>							<b>0</b>	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota	Luas RTH publik yang dikelola	82	Ha	1 Wilayah	1 Wilayah	1 Wilayah	100	2 Laporan		0	Dinas Lingkungan Hidup
<b>2.11.05</b>	<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>	<b>Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3</b>	<b>74</b>	<b>%</b>	<b>73,33%</b>	<b>70%</b>	<b>78,57%</b>	<b>112</b>	<b>70%</b>		<b>0</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase terverifikasinya kepastian Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis	25	%							0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlayannya Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60	%	1 Data	1 Data	1 Data	100	1 Laporan		0	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.06	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>	<b>Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001</b>	<b>1</b>	<b>Penghargaan</b>	<b>1 Penghargaan</b>	<b>1 Perusahaan</b>	<b>1 Perusahaan</b>	<b>100</b>	<b>1 Perusahaan</b>		<b>0</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>
		<b>Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>30</b>	<b>%</b>								<b>0</b>

2.11.06. 2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota	100	%	1 Dokumen	4 Kali	2 Kali	50	2 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup
<b>02.11.08</b>	<b>Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)</b>	<b>100</b>	<b>%</b>						<b>0</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>
2.11.04. 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan hidup	100	%						0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	<b>Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>1 Penghargaan</b>	<b>1 Penghargaan</b>	<b>2 Penghargaan</b>	<b>200</b>	<b>1 Penghargaan</b>	<b>0</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>
		<b>Persentase masyarakat yang kinerjanya baik dalam rangka PPLH</b>	<b>10</b>	<b>%</b>						<b>0</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>
		<b>Persentase lembaga yang kinerjanya baik dalam rangka PPLH</b>	<b>20</b>	<b>%</b>						<b>0</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>

2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1	Entitas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Laporan		0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	<b>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	<b>Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota</b>	100	%	60%	80%	100%	125	80%		0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	20	Kasus	3 Kasus	5 Kasus	6 Kasus	120	1 Laporan		0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani</b>			94,59%	88%	95,80%	109	89,50%		0	Dinas Lingkungan Hidup
		<b>Persentase Timbulan Sampah yang di Daur Ulang</b>			5,41%	12%	13,69%	114	10,50%		0	Dinas Lingkungan Hidup
		<b>Persentase pengelolaan sampah di perkotaan</b>	13	%								0
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah yang terangkut ke TPA	90	%	94,59%	88%	95,80%	109	1 Laporan		0	Dinas Lingkungan Hidup

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun analisis dan evaluasi secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

**Sasaran : "Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan".**

Tolok ukur capaian sasaran terdiri dari tiga indikator yaitu persentase pengelolaan sampah dan limbah B3 yang tertangani dengan target 88%, persentase kepatuhan pelaksanaan dokumen lingkungan dengan target 22,93%, persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau) dengan target 21,32%.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas masing-masing dengan rumus tersendiri :

### 1. *Persentase pengelolaan sampah dan limbah B3 yang tertangani*

Berikut data Jumlah Sampah Kota Pangkalpinang Tahun 2022

Perkiraan Produksi Sampah	185.873,57	Kg/Hari
Jumlah sampah yang terangkut ke TPA	177.900	Kg/Hari
Jumlah Sampah yang diantar langsung ke TPA	7.137	Kg/Hari
Jumlah Sampah yang terkelola	3126,05	Kg/Hari
Jumlah Sampah yang tidak terangkut dan terkelola	510,52	Kg/Hari

Persentase pengelolaan sampah dan limbah B3 yang tertangani

Untuk persentase pengelolaan sampah dan limbah B3 yang tertangani, rumusnya adalah

$$\frac{\text{Jumlah sampah dan Limbah B3 yang ditangani}}{\text{Jumlah timbulan sampah dan Limbah B3}} \times 100 \%$$
$$\frac{177.900}{185.873,57} \times 100 \% = 95,71\%$$

Untuk target yang diharapkan yaitu 88 %, maka indikator diatas dinyatakan berhasil. Hal ini terjadi karena Pasukan Kuning sangat konsen terhadap sampah. Mulai dari petugas kebersihan, dump truk, arm roll, mobil sweeping, mobil sapu sudah berjalan maksimal. Selain itu, Pemerintah Kota

Pangkalpinang juga telah menyediakan contact person yang dapat dihubungi masyarakat yang berkaitan dengan masalah penanganan sampah. Ketika menemukan penumpukan sampah, maka masyarakat dapat melaporkan ke contact person 0812-7307-9332.

## **2. Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan**

Berikut data pelaksanaan pengawasan perusahaan di Kota Pangkalpinang Tahun 2022:

Evaluasi pemenuhan sanksi : 15 perusahaan

Jumlah Pengawasan : 34 Perusahaan

(daftar perusahaan terdapat pada lampiran)

Persentase kepatuhan pelaksanaan dokumen lingkungan

Untuk persentase kepatuhan pelaksanaan dokumen lingkungan, rumusnya adalah

$$\frac{\text{Evaluasi Pemenuhan Sanksi}}{\text{Jumlah Pengawasan}} \times 100 \%$$
$$\frac{15}{34} \times 100 \% = 44,12\%$$

Untuk target yang diharapkan yaitu 22,93%, maka indikator di atas dinyatakan berhasil. Hal ini terjadi karena pengawasan terhadap perusahaan/pelaku usaha di kota pangkalpinang telah ditingkatkan pada tahun ini, dengan pembinaan yang intens dari Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan kesadaran pemrakarsa dalam melaksanakan kewajibannya yang tertera dalam dokumen lingkungan.

## **3. Persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau)**

Berikut data ruang terbuka hijau Kota Pangkalpinang Tahun 2022:

Luas RTH:

(pada lampiran)

Luas Wilayah Perkotaan:

Luas Adm Kota Pangkalpinang

10.455,65 Ha



Persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau)

Untuk persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau), rumusnya adalah

$$\frac{\text{Luas RTH (Ruang Terbuka Hijau)}}{\text{Luas Wilayah Perkotaan}} \times 100 \%$$
$$\frac{2.219,24}{10.455,65} \times 100 \% = 21,225 \%$$

Untuk target yang diharapkan yaitu 21,32 %, maka indikator diatas dinyatakan belum berhasil. Hal ini terjadi karena adanya perubahan RTRW Kota Pangkalpinang.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dapat dilihat di Tabel di bawah ini :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM	RUMUSAN	SATUAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	7	12	13	14	15	16	17
	Meningkatkan kualitas penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup		Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	Capaian IKLH Tahun N yang tercapai DIBAGI Target IKLH RPJMD pada Tahun N DIKALI 100	%	103,99	99,64	102,54	98,74	101,14	
		Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	Persentase pengelolaan sampah dan limbah B3 yang tertangani	Jumlah sampah dan Limbah B3 yang ditangani DIBAGI Jumlah timbulan sampah dan Limbah B3 DIKALI 100	%	86,50	94,31	88,00	95,71	89,50	
			Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	Evaluasi Pemenuhan Sanksi DIBAGI Jumlah Pengawasan DIKALI 100	%	15,87	22,73	22,93	44,12	30,00	
			Persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau)	Luas RTH (Ruang Terbuka Hijau) DIBAGI Luas Wilayah Perkotaan DIKALI 100	%	21,31	21,225	21,32	21,225	21,33	
			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu DIBAGI jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan DIKALI 100	%	100	100	100	100	100	
			Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	Jumlah PAD yang dihasilkan Perangkat Daerah DIBAGI jumlah PAD keseluruhan DIKALI 100	%	100	-	100	100	100	
			Persentase ASN yang memenuhi standar	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	%	100	100	100	100	100	



			kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	DIBAGI jumlah aparatur yang harus ditingkatkan kapasitasnya DIKALI 100							
			Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan DIBAGI layanan administrasi perkantoran yang dibutuhkan DIKALI 100	%	100	100	100	100	100	
			Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik DIBAGI dengan jumlah sarana dan prasana yang ada DIKALI 100	%	100	100	100	100	100	
			Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan yang terlaksana DIBAGI Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup DIKALI 100	%	80		80	100	80	
			Kualitas air danau	Mempertahankan mutu kualitas air danau diwakili parameter BOD (mg/l)	mg/l	2	4,52	2	2,28	2	
			Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Peningkatan mutu kualitas air diwakili parameter BOD (mg/l)	mg/l	5,54	4,67	4,27	2	3	
			Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Luas lahan kritis yang direhabilitasi DIBAGI luas lahan kritis keseluruhan DIKALI 100	%	3	2	3	2	3	
			Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang	Luas Lahan dibagi luas wilayah dikali 100	%	21,2	21,23	21,3	21,3	21,3	
			Persentase terkendalinya B3 dan Limbah B3	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan izin DIBAGI jumlah perusahaan yang mengajukan izin DIKALI 100	%	70	73,33	70	78,57	70	
			Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001		Perusahaan	0	1	1	1	1	
			Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penghargaan	1	1	1	2	1	
			Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan DIBAGI Total Jumlah Pengaduan Masyarakat yang terregistrasi DIKALI 100	%	80	60	80	100	80	

			Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	Jumlah Sampah yang ditangani DIBAGI Jumlah Timbulan Sampah DIKALI 100	%	86,5	94,59	88	95,8	89,5	
			Persentase Timbulan Sampah yang di Daur Ulang	Jumlah Sampah yang terkelola dengan metode 3 R DIBAGI Jumlah Timbulan Sampah DIKALI 100	%	13,5	5,41	12	13,69	10,5	

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang**

Dengan kondisi yang ada dan tingkat capaian pelayanan sebagaimana di atas, tentu masih dijumpai adanya kendala, tantangan ataupun hambatan. Terdapat beberapa isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH yaitu :

1. Penurunan kualitas lingkungan hidup (kualitas tanah, udara dan air).
2. Ancaman penurunan keanekaragaman hayati.
3. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
4. Keterbatasan Sarana Prasarana pengolahan persampahan.
5. Kurangnya akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
6. Pemanasan global.
7. Penguatan laboratorium lingkungan.
8. Penguatan kinerja pengelolaan persampahan.

### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang**

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis OPD periode 2024-2026 yang berakhir pada tahun 2026, dan diperlukan adanya review atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Pada dasarnya yang tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sudah merupakan kebutuhan dan merupakan skala prioritas untuk dilaksanakan. Hal itu tentu dalam upaya mengakomodir rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup guna mendukung fungsi perlindungan dan pengawasan lingkungan hidup di Kota Pangkalpinang.

Review terhadap RKPD/ Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 Kota pangkalpinang tertuang dalam Tabel 2.3.

**Tabel 2.3.**  
**Review terhadap RKPD/ Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota pangkalpinang**  
**Tahun 2024**

No.	RANCANGAN AWAL SKPD/RENSTRA					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DLH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73%	7.439.033.140	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DLH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74%	6.654.489.582	
		DLH	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	80%			DLH	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	85%		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	15.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	21.579.600	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLH	Jumlah Dokumen Renstra/Renja	3 Dokumen	12.117.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DLH	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DLH	Jumlah Dokumen LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD yang disusun	2 Laporan	5.084.500	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.378.100	

	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>DLH</b>	<b>Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>6.452.345.468</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>DLH</b>	<b>Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>5.499.881.897</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	5.962.845.468	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	5.003.426.469	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DLH	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	462.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DLH	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	461.655.528	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DLH	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	20.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DLH	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	27.300.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DLH	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DLH	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DLH	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DLH	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.499.900	
	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>DLH</b>	<b>Presentase terpenuhinya Administrasi PAD Perangkat Daerah</b>	<b>2,3%</b>	<b>15.000.000</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>DLH</b>	<b>Presentase terpenuhinya Administrasi PAD Perangkat Daerah</b>	<b>2,3%</b>	<b>11.850.000</b>	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	DLH	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	5.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	DLH	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	6.600.000	

	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	DLH	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Dokumen	10.000.000		Penetapan Wajib Retribusi Daerah	DLH	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Dokumen	5.250.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>DLH</b>	<b>Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN</b>	<b>0%</b>	<b>85.000.000</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>DLH</b>	<b>Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian</b>	<b>0%</b>	<b>75.459.000</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DLH	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45 Paket	50.000.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DLH	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45 Paket	35.459.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	DLH	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	25.000.000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	DLH	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	30.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	DLH	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	10.000.000		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	DLH	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	10.000.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>DLH</b>	<b>Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>250.000.000</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>DLH</b>	<b>Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>306.971.925</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DLH	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DLH	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.999.700	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	DLH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000		Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	DLH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	81.558.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DLH	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.000.000		Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	DLH	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	18.414.475	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DLH	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DLH	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DLH	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	30.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DLH	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	29.999.750	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	132.000.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>DLH</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>DLH</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>	
	Pengadaan Mebel	DLH	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	20.000.000	Pengadaan Mebel	DLH	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	10.000.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>DLH</b>	<b>Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>265.000.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>DLH</b>	<b>Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>391.047.488</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DLH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lapangan yang Disediakan	1 Laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DLH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lapangan yang Disediakan	1 Laporan	276.050.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DLH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	90.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DLH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	89.997.488	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	DLH	Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	336.687.672	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	DLH	Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	337.699.672	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DLH	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	50.190.696	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DLH	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	50.190.696	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	DLH	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	15 Unit	186.496.976	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	DLH	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	15 Unit	186.496.976	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	DLH	jumlah Gedung Kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	DLH	jumlah Gedung Kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	50.463.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DLH	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DLH	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.549.000	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>DLH</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun</b>	<b>80%</b>	<b>215.000.000</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>DLH</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun</b>	<b>80%</b>	<b>215.000.000</b>	
	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota</b>	<b>DLH</b>	<b>Persentase tersusunnya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota</b>	<b>100%</b>	<b>65.000.000</b>	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota</b>	<b>DLH</b>	<b>Persentase tersusunnya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>65.000.000</b>	
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	DLH	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	40.000.000	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	DLH	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	40.000.000	

	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	DLH	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	DLH	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000	
	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>DLH</b>	<b>Persentase tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>		<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>DLH</b>	<b>Persentase tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	DLH	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	25.000.000		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	DLH	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	25.000.000	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	DLH	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	DLH	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	DLH	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 Dokumen	25.000.000		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	DLH	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 Dokumen	25.000.000	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>DLH</b>	<b>Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai baku mutu</b>	<b>35%</b>	<b>555.000.000</b>		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>DLH</b>	<b>Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai baku mutu</b>	<b>35%</b>	<b>654.994.400</b>	
	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	DLH	Jumlah Laporan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	4 Laporan	555.000.000		Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	DLH	Jumlah Laporan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	4 Laporan	654.994.400	

	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, udara dan laut	DLH	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	40.000.000	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, udara dan laut	DLH	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	39.994.400	
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	DLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	15.000.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	15.000.000	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DLH	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 Dokumen	500.000.000	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	DLH	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 Dokumen	600.000.000	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>DLH</b>	<b>Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati</b>	<b>21,30%</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>DLH</b>	<b>Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati</b>	<b>21,30%</b>	<b>2.536.995.320</b>	
	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota</b>	<b>DLH</b>	<b>Luas RTH publik yang dikelola</b>	<b>82 Ha</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota</b>	<b>DLH</b>	<b>Luas RTH publik yang dikelola</b>	<b>82 Ha</b>	<b>2.536.995.320</b>	
	Pengelolaan Kebun Raya	DLH	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	60,8 Ha	300.000.000	Pengelolaan Kebun Raya	DLH	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	60,8 Ha	366.999.198	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	DLH	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	21,16 Ha	2.000.000.000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	DLH	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	21,16 Ha	2.169.996.122	

5	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>DLH</b>	<b>Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3</b>	<b>74%</b>	<b>35.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>DLH</b>	<b>Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3</b>	<b>74%</b>	<b>44.053.300</b>	
	<b>Penyimpanan sementara Limbah B3</b>	<b>DLH</b>	<b>Persentase terverifikasinya kepastian Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3</b>	<b>25%</b>	<b>20.000.000</b>	<b>Penyimpanan sementara Limbah B3</b>	<b>DLH</b>	<b>Persentase terverifikasinya kepastian Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3</b>	<b>25%</b>	<b>29.053.300</b>	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	<b>DLH</b>	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	10.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	<b>DLH</b>	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	19.053.300	
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	<b>DLH</b>	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	3 Laporan	10.000.000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	<b>DLH</b>	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	3 Laporan	10.000.000	
	<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>DLH</b>	<b>Persentase terlayannya Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>60%</b>	<b>15.000.000</b>	<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>DLH</b>	<b>Persentase terlayannya Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>60%</b>	<b>15.000.000</b>	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan	DLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan	DLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	15.000.000	
6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	DLH	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	30%	20.000.000	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	DLH	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	30%	45.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota	DLH	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	20.000.000	Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota	DLH	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	45.000.000	

	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau Izin PPLH	DLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	10.000.000	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau Izin PPLH	DLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	10.000.000	
	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidiup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DLH	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	10.000.000	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidiup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DLH	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	35.000.000	
7	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	DLH	<b>Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)</b>	<b>100%</b>	<b>40.000.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	DLH	<b>Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)</b>	<b>100%</b>	<b>39.900.000</b>	
	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	DLH	<b>Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan hidup</b>	<b>100%</b>	<b>40.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	DLH	<b>Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan hidup</b>	<b>100%</b>	<b>39.900.000</b>	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	DLH	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	2 Lembaga	10.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	DLH	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	2 Lembaga	9.900.000	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	DLH	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya	1 Dokumen	10.000.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	DLH	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya	1 Dokumen	0	

			Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan					Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye	DLH	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	50 Orang	10.000.000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye	DLH	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	50 Orang	30.000.000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	DLH	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	10 Orang	10.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	DLH	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	10 Orang	0	
8	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	DLH	<b>Persentase masyarakat yang kinerjanya baik dalam rangka PPLH</b>	<b>10%</b>	<b>20.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	DLH	<b>Persentase masyarakat yang kinerjanya baik dalam rangka PPLH</b>	<b>10%</b>	<b>50.000.000</b>	
		DLH	<b>Persentase lembaga yang kinerjanya baik dalam rangka PPLH</b>	<b>20%</b>			DLH	<b>Persentase lembaga yang kinerjanya baik dalam rangka PPLH</b>	<b>20%</b>		
	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	DLH	<b>Persentase masyarakat atau lembaga yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota</b>	<b>20%</b>	<b>20.000.000</b>	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	DLH	<b>Persentase masyarakat atau lembaga yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota</b>	<b>20%</b>	<b>50.000.000</b>	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Dunia Pendidikan /Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	20.000.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Dunia Pendidikan /Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan /Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	50.000.000	

9	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	DLH	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah	100%	10.000.000	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	DLH	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah	100%	37.000.000	
	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota</b>	DLH	<b>Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>20 Kasus</b>	<b>10.000.000</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota</b>	DLH	<b>Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>20 Kasus</b>	<b>37.000.000</b>	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	DLH	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 Dokumen	10.000.000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	DLH	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 Dokumen	37.000.000	
10	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	DLH	<b>Persentase pengelolaan sampah di perkotaan</b>	<b>13%</b>	<b>14.013.994.113</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	DLH	<b>Persentase pengelolaan sampah di perkotaan</b>	<b>13%</b>	<b>14.598.953.398</b>	
	<b>Pengelolaan Persampahan</b>	DLH	<b>Persentase Sampah yang terangkut ke TPA</b>	<b>90%</b>	<b>14.013.994.113</b>	<b>Pengelolaan Persampahan</b>	DLH	<b>Persentase Sampah yang terangkut ke TPA</b>	<b>90%</b>	<b>14.598.953.398</b>	
	Penanganan sampah dengan melakukan Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kota	DLH	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	64183,42 Ton	14.005.994.113	Penanganan sampah dengan melakukan Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kota	DLH	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	64183,42 Ton	14.542.953.398	

	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	DLH	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 Kelompok	2.000.000	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	DLH	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 Kelompok	50.000.000	
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	DLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	DLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	4.000.000	
	Penyusunan Kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	DLH	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	DLH	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	2.000.000	
	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kota	DLH	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	6 Unit	2.000.000	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kota	DLH	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	6 Unit	0	
					<b>24.648.027.253</b>						<b>24.876.386.000</b>

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang mendukung tugas Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, maka para pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang adalah para petugas di tingkat kelurahan, Kecamatan dan RT/RW di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan juga berupa pokok pikiran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kemudian masih terdapat kritik dan saran dari pihak eksternal yang menyangkut peningkatan pelayanan seperti ketersediaan fasilitas pendukung pengelolaan sampah berupa tong sampah.

## BAB 3

# TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Di dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pusat. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut maka kegiatan yang akan dilakukan diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Pangkalpinang.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

#### 3.2.1 Tujuan

Tujuan dari renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang adalah :

1. Meningkatkan kualitas penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### 3.2.2. Sasaran

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan adalah:

1. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, persampahan, dan pelayanan internal.

#### 3.2.3. Strategi

Strategi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang adalah "***Peningkatan kualitas tata ruang wilayah berbasis lingkungan***". Berpedoman pada strategi tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang untuk 3 (tiga) tahun ke depan merumuskan strategi sebagai berikut:

1. Melaksanakan perencanaan lingkungan hidup

2. Menyelenggarakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
3. Menyelenggarakan pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)
4. Menyelenggarakan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota
6. Melaksanakan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
7. Membina dan meningkatkan penghargaan lingkungan hidup
8. Melaksanakan penanganan pengaduan lingkungan hidup
9. Melaksanakan pengelolaan persampahan.

#### **3.3.4. Kebijakan**

Kebijakan pelaksanaan program prioritas RPD Kota Pangkalpinang 2024-2026 yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang adalah "***Peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup***", maka kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang untuk 3 (tiga) tahun ke depan adalah:

1. Menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kota
2. Melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kota
3. Mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
4. Mengelola keanekaragaman hayati di kota
5. Melakukan pengumpulan limbah B3 lintas kota
6. Membina dan mengawasi izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kota
7. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan di tingkat kota
8. Memberikan penghargaan lingkungan hidup tingkat kota
9. Menyelesaikan pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) kota
10. Menangani sampah di TPA/TPST.

### 3.3.5. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2024 s.d 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Outcome	Target (%)		
				2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup		Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,01 Indeks	64,54 Indeks	65,06 Indeks
2		Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, persampahan, dan pelayanan internal	Persentase pengelolaan sampah yang tertangani	95,00 %	95,50 %	96,00 %
			Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	30,00 %	35,00 %	40,00 %
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	39,70 %	41,73 %	43,75 %
			Indeks Kualitas Air	51,23 %	51,33 %	51,43 %
			Indeks Kualitas Udara	89,03 %	89,14 %	89,24 %

Penetapan indikator-indikator kegiatan utama tersebut menjadi dasar bagi penetapan dan indikator-indikator kegiatan-kegiatan penunjang. Logika pengembangan indikator-indikator penunjang ini diletakkan suatu peta yang strategis yang menggambarkan kaitan sebab akibat yang menyeimbangkan pengembangan aspek manajemen internal seperti kapasitas kelembagaan dan proses internal.

Pada dasarnya, seluruh kaitan sebab akibat antar indikator kinerja ini sama dengan hubungan sebab akibat yang sudah diasumsikan terjadi pada tujuan dan program sebagaimana digambarkan pada bagian terdahulu. Jadi seluruh indikator kinerja kegiatan pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran akan dianggap faktor yang berperan dalam mencapai kinerja pada tiga perspektif diatas. Indikator

kegiatan perspektif peningkatan proses internal pun diasumsikan akan menyumbang bagi pencapaian hasil kegiatan-kegiatan pada perspektif diatas.

Peta strategi dan indikator kinerja kunci tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh Organisasi dalam mengembangkan berbagai kegiatan yang dianggap perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan keunikan permasalahan dimasing-masing tempat.

### 3.3.6. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Outcome	Target
1	Meningkatkan kualitas penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup		Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,01 Indeks
2		Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, persampahan, dan pelayanan internal	Persentase pengelolaan sampah yang tertangani	95,00 %
			Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	30,00 %
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	39,70 %
			Indeks Kualitas Air	51,23 %
			Indeks Kualitas Udara	89,03 %

### **3.3.7. Program dan Kegiatan**

#### **A. Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
  - a. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
  - b. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
  - a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
  - b. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
  - c. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

#### **B. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
  - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
  - c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

#### **C. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
  - a. Pengelolaan Kebun Raya
  - b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

#### **D. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**

1. Penyimpanan sementara Limbah B3

- a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  - b. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
2. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

**E. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
  - b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**F. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
  - b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
  - c. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye
  - d. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat

## **G. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
  - a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## **H. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
  - a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

## **I. Program Pengelolaan Persampahan**

1. Pengelolaan Sampah
  - a. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota
  - b. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
  - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
  - d. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
  - e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota

## **J. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah
  - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
    - a. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
    - b. Penetapan Wajib Retribusi Daerah
  4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
    - c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
  5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Pengadaan Mebel
  7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
    - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

## BAB 4

# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2024 sebagai acuan bagi perangkat daerah yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi perangkat daerah sebagai pelaksana program, Renja Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2024 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024, diharapkan dana yang tersedia benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu perangkat daerah juga membuat rencana aksi dalam upaya pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan Renja Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar bidang dalam OPD, OPD dengan perangkat daerah lainnya, maupun OPD dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan Surat Edaran Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Nomor 07/SE/Bappeda-Litbang/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang ditetapkan program prioritas dan pagu indikatif sumber dana APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 24.876.386.000 (Dua puluh empat milyar delapan ratus tujuh

puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan program prioritas antara lain: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dan Program Pengelolaan Persampahan.

Untuk jelasnya Rencana Kerja Akhir dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dapat kita lihat pada tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1**

**Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2024**

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Indikator Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024							Perkiraan Maju Tahun 2025		Keterangan
			Kelompok sasaran	Target Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (RP)				Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Refocusing	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)				
1	2	3	4	5	6	7	8	8 = 8- 6	9	10	11	12
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Dinas lingkungan hidup	73	6.654.489.582		6.654.489.582	0	APBD	74	7.859.076.684	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Dinas lingkungan hidup	80						85		
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	Dinas lingkungan hidup	100%	21.579.600		21.579.600	0	APBD	100%	15.375.000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas lingkungan hidup	3 Dokumen	12.117.000		12.117.000	0	APBD	3 Dokumen	5.125.000	

1.1. 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas lingkungan hidup	2 Laporan	5.084.500		5.084.500	0	APBD	2 Laporan	5.125.000	
1.1. 3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas lingkungan hidup	1 Laporan	4.378.100		4.378.100	0	APBD	1 Laporan	5.125.000	
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP</b>	<b>Dinas lingkungan hidup</b>	<b>100%</b>	<b>5.499.881.897</b>		<b>5.499.881.897</b>	<b>0</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>6.693.971.820</b>	
1.2. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas lingkungan hidup	45 Orang/Bulan	5.003.426.469		5.003.426.469	0	APBD	45 Orang/Bulan	6.192.234.320	
1.2. 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas lingkungan hidup	1 Dokumen	461.655.528		461.655.528	0	APBD	1 Dokumen	473.550.000	
1.2. 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas lingkungan hidup	2 Dokumen	27.300.000		27.300.000	0	APBD	2 Bulan	20.500.000	
1.2. 4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas lingkungan hidup	1 Laporan	5.000.000		5.000.000	0	APBD	1 Laporan	5.125.000	



1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas lingkungan hidup	12 Laporan	2.499.900	2.499.900	0	APBD	12 Laporan	2.562.500	
1.3	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD</b>	<b>Kota Pangkalpinang</b>	<b>2,3%</b>	<b>11.850.000</b>	<b>11.850.000</b>	<b>0</b>	<b>APBD</b>	<b>2,31%</b>	<b>15.375.000</b>	
1.3.1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Kota Pangkalpinang	1 Dokumen	6.600.000	6.600.000	0	APBD	1 Dokumen	5.125.000	
1.3.2	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Kota Pangkalpinang	1 Dokumen	5.250.000	5.250.000	0	APBD	1 Dokumen	10.250.000	
1.4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN</b>	<b>Dinas lingkungan hidup</b>	<b>0%</b>	<b>75.459.000</b>	<b>75.459.000</b>	<b>0</b>	<b>APBD</b>	<b>0%</b>	<b>87.125.000</b>	
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas lingkungan hidup	45 Paket	35.459.000	35.459.000	0	APBD	45 Paket	51.250.000	
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas lingkungan hidup	10 Orang	30.000.000	30.000.000	0	APBD	10 Orang	25.625.000	
1.4.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas lingkungan hidup	5 Orang	10.000.000	10.000.000	0	APBD	5 Orang	10.250.000	

1.5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Dinas lingkungan hidup</b>	<b>100%</b>	<b>306.971.925</b>	<b>306.971.925</b>	<b>0</b>	<b>APBD</b>	<b>5 Laporan</b>	<b>256.250.000</b>	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas lingkungan hidup	1 Paket	9.999.700	9.999.700	0	APBD	1 Paket	10.250.000	
1.5.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas lingkungan hidup	1 Paket	81.558.000	81.558.000	0	APBD	1 Paket	51.250.000	
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinas lingkungan hidup	1 Paket	18.414.475	18.414.475	0	APBD	1 Paket	25.625.000	
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas lingkungan hidup	1 Paket	35.000.000	35.000.000	0	APBD	1 Paket	35.875.000	
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas lingkungan hidup	2 Paket	29.999.750	29.999.750	0	APBD	2 Paket	30.750.000	
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas lingkungan hidup	1 Laporan	132.000.000	132.000.000	0	APBD	1 Laporan	102.500.000	
1.6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah</b>	<b>Dinas lingkungan hidup</b>	<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>20.500.000</b>	
1.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas lingkungan hidup	1 Unit	10.000.000	10.000.000	0	APBD	1 Unit	20.500.000	
1.7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya Jasa</b>	<b>Dinas lingkungan hidup</b>	<b>100%</b>	<b>391.047.488</b>	<b>391.047.488</b>	<b>0</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>425.375.000</b>	



		<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lapangan yang Disediakan	Dinas lingkungan hidup	1 Laporan	276.050.000		276.050.000	0	APBD	1 Laporan	307.500.000	
1.7.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas lingkungan hidup	1 Laporan	25.000.000		25.000.000	0	APBD	1 Laporan	25.625.000	
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas lingkungan hidup	1 Laporan	89.997.488		89.997.488	0	APBD	1 Laporan	92.250.000	
<b>1.8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik</b>	<b>Dinas lingkungan hidup</b>	<b>100%</b>	<b>337.699.672</b>		<b>337.699.672</b>	<b>0</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>345.104.864</b>	
1.8.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas lingkungan hidup	1 Unit	50.190.696		50.190.696	0	APBD	1 Unit	51.445.463	
1.8.2	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas lingkungan hidup	15 Unit	186.496.976		186.496.976	0	APBD	15 Unit	191.159.400	



1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas lingkungan hidup	1 Unit	50.463.000		50.463.000	0	APBD	1 Unit	51.250.000	
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas lingkungan hidup	1 Unit	50.549.000		50.549.000	0	APBD	1 Unit	51.250.000	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun</b>	<b>Dinas lingkungan hidup</b>	<b>80%</b>	<b>215.000.000</b>		<b>215.000.000</b>	<b>0</b>	<b>APBD</b>	<b>80%</b>	<b>346.000.000</b>	
2.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota	Persentase tersusunnya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota	Dinas lingkungan hidup	100%	65.000.000		65.000.000	0	APBD	100%	92.250.000	
2.1.1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dinas lingkungan hidup	1 Dokumen	40.000.000		40.000.000	0	APBD	1 Dokumen	41.000.000	
2.1.2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dinas lingkungan hidup	1 Dokumen	25.000.000		25.000.000	0	APBD	1 Dokumen	51.250.000	
2.2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan	Dinas lingkungan hidup	100%	150.000.000		150.000.000	0	APBD	100%	253.750.000	



		<b>Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>										
2.2. 1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dinas lingkungan hidup	1 Dokumen	25.000.000		25.000.000	0	APBD	1 Dokumen	51.250.000	
2.2. 2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dinas lingkungan hidup	1 Dokumen	100.000.000		100.000.000	0	APBD	1 Dokumen	102.500.000	
2.2. 3	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Dinas lingkungan hidup	1 Dokumen	25.000.000		25.000.000	0	APBD	1 Dokumen	100.000.000	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai baku mutu</b>	<b>Kota Pangkalpinang</b>	<b>35%</b>	<b>654.994.400</b>		<b>654.994.400</b>	<b>0</b>	<b>APBD</b>	<b>36%</b>	<b>568.875.000</b>	
3.1	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Kota Pangkalpinang	4 Laporan	654.994.400		654.994.400	0	APBD	4 Laporan	568.875.000	
3.1. 1	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, udara dan laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Pangkalpinang	1 Dokumen	39.994.400		39.994.400	0	APBD	1 Dokumen	41.000.000	

3.1.2	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Pangkalpinang	1 Dokumen	15.000.000		15.000.000	0	APBD	1 Dokumen	15.375.000	
3.1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	UPTD laboratorium lingkungan	2 Dokumen	600.000.000		600.000.000	0	APBD	2 Dokumen	512.500.000	
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati</b>	<b>Kota Pangkalpinang</b>	<b>74%</b>	<b>2.536.995.320</b>		<b>2.536.995.320</b>	<b>0</b>	<b>APBD</b>	<b>75%</b>	<b>2.357.500.000</b>	
4.1	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota</b>	<b>Luas RTH publik yang dikelola</b>	<b>Kota Pangkalpinang</b>	<b>82 Ha</b>	<b>2.536.995.320</b>		<b>2.536.995.320</b>	<b>0</b>	<b>APBD</b>	<b>82 Ha</b>	<b>2.357.500.000</b>	
4.1.1	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pangkalpinang	60,8 Ha	366.999.198		366.999.198	0	APBD	60,8 Ha	307.500.000	
4.1.2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pangkalpinang	21,16 Ha	2.169.996.122		2.169.996.122	0	APBD	21,16 Ha	2.050.000.000	
5	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3</b>	<b>Kota Pangkalpinang</b>	<b>74%</b>	<b>44.053.300</b>		<b>44.053.300</b>	<b>0</b>	<b>APBD</b>	<b>74,5%</b>	<b>35.875.000</b>	

5.1	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase terverifikasinya kepastian Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Kota Pangkalpinang	25%	29.053.300		29.053.300	0	APBD	25%	20.500.000	
5.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas lingkungan hidup	12 Dokumen	19.053.300		19.053.300	0	APBD	12 Dokumen	10.250.000	
5.1.2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Dinas lingkungan hidup	3 Laporan	10.000.000		10.000.000	0	APBD	3 Laporan	10.250.000	
5.2	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlayannya Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkalpinang	60%	15.000.000		15.000.000	0	APBD	61%	15.375.000	

5.2. 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewangannya	Dinas lingkungan hidup	1 Dokumen	15.000.000		15.000.000	0	APBD	1 Dokumen	15.375.000	
6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Pangkalpinang</b>	<b>30%</b>	<b>45.000.000</b>		<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>APBD</b>	<b>35%</b>	<b>20.500.000</b>	
6.1	<b>Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Pangkalpinang</b>	<b>100%</b>	<b>45.000.000</b>		<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>20.500.000</b>	

6.1.2	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kota Pangkalpinang	1 Dokumen	10.000.000		10.000.000	0	APBD	1 Dokumen	10.250.000	
6.1.3	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidiup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkalpinang	1 Laporan	35.000.000		35.000.000	0	APBD	1 Laporan	10.250.000	
7	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)</b>	<b>Kota Pangkalpinang</b>	<b>100%</b>	<b>39.900.000</b>		<b>39.900.000</b>	<b>0</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>41.000.000</b>	
7.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan hidup	Kota Pangkalpinang	100%	39.900.000		39.900.000	0	APBD	100%	41.000.000	
7.1.1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya	Kota Pangkalpinang	2 Lembaga	9.900.000		9.900.000	0	APBD	2 Lembaga	10.250.000	

	Lembaga Kemasyarakatan	Terkait PPLH										
7.1.2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Pangkalpinang	1 Dokumen	-	-	0	APBD	1 Dokumen	10.250.000		
7.1.3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kota Pangkalpinang	50 Orang	30.000.000	30.000.000	0	APBD	50 Orang	10.250.000		
7.1.4	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Kota Pangkalpinang	10 Keluarga	-	-	0	APBD	10 Keluarga	10.250.000		
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang kinerjanya baik dalam rangka PPLH	Kota Pangkalpinang	10%	50.000.000	50.000.000	0	APBD	10%	20.500.000		
		Persentase lembaga yang kinerjanya baik dalam rangka PPLH	Kota Pangkalpinang	20%					20%			
8.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat atau lembaga yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Pangkalpinang	20%	50.000.000	50.000.000	0	APBD	20%	20.500.000		

8.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kota Pangkalpinang	1 Entitas	50.000.000		50.000.000	0	APBD	1 Entitas	20.500.000	
9	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah</b>	<b>Kota Pangkalpinang</b>	<b>100%</b>	<b>37.000.000</b>		<b>37.000.000</b>	<b>0</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>10.250.000</b>	
9.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kota Pangkalpinang	20 Kasus	37.000.000		37.000.000	0	APBD	20 Kasus	10.250.000	
9.1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Kota Pangkalpinang	1 Dokumen	37.000.000		37.000.000	0	APBD	1 Dokumen	10.250.000	
10	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase pengelolaan sampah di perkotaan</b>	<b>Kota Pangkalpinang</b>	<b>13%</b>	<b>14.598.953.398</b>		<b>14.598.953.398</b>	<b>0</b>	<b>APBD</b>	<b>14%</b>	<b>14.514.292.602</b>	
10.1	Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah yang terangkut ke TPA	Kota Pangkalpinang	90%	14.598.953.398		14.598.953.398	0	APBD	90%	14.514.292.602	

10.1.1	Penanganan sampah dengan melakukan Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Pangkalpinang	64183,42 Ton	14.542.953.398		14.542.953.398	0	APBD	64183,42 Ton	14.506.092.602	
10.1.2	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kota Pangkalpinang	2 Kelompok	50.000.000		50.000.000	0	APBD	2 Kelompok	2.050.000	
10.1.3	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dinas lingkungan hidup	1 Dokumen	4.000.000		4.000.000	0	APBD	1 Dokumen	2.050.000	

10.1.4	Penyusunan Kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dinas lingkungan hidup	1 Dokumen	2.000.000		2.000.000	0	APBD	1 Dokumen	2.050.000	
10.1.5	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Dinas lingkungan hidup	6 Unit	-		-	0	APBD	6 Unit	2.050.000	
<b>TOTAL</b>					<b>24.876.386.000</b>		<b>24.876.386.000</b>	<b>0</b>			<b>25.773.869.286</b>	

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah daerah melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan Surat Edaran Nomor 07/SE/Bappeda-Litbang/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan sebesar Rp. Rp. 24.876.386.000 (Dua puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) melakukan pemetaan sebagai mana dimaksud diatas.

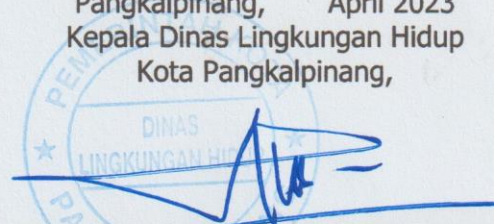
## BAB 5

# PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, baik dalam kerangka regulasi maupun keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pangkalpinang, April 2023  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Pangkalpinang,



**Bartholomeus Suharto, S.T., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19720824 199803 1 002

*Lampiran*



# WALIKOTA PANGKALPINANG

Pangkalpinang, 13 Maret 2023

Kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang  
2. Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang  
3. Inspektur Kota Pangkalpinang  
4. Kepala Badan Se-Kota Pangkalpinang  
5. Kepala Dinas Se-Kota Pangkalpinang  
6. Direktur RSUD Depati Hamzah  
7. Camat Se-Kota Pangkalpinang  
di -

PANGKALPINANG

## SURAT EDARAN

Nomor : 07 /SE/ Bappeda-Litbang/ III / 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA)  
PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan ini diminta kepada Saudara/i untuk melakukan penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 dengan berpedoman pada Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran ini.

Demikian surat edaran disampaikan untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

WALI KOTA PANGKALPINANG,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping initial 'M' followed by a series of smaller, connected loops and a final horizontal stroke.

H. MAULAN AKLIL



LAMPIRAN : SURAT EDARAN WALI KOTA PANGKALPINANG  
Nomor : 07 /SE/Bappeda-Litbang/ III /2023  
Tanggal : 13 Maret 2023

## **PEDOMAN PENYUSUNAN**

# **PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024**



## I. PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) Kota Pangkalpinang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah Kota Pangkalpinang yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja, target, dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk itu, dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan di Kota Pangkalpinang sehingga dapat menghasilkan Renja Perangkat Daerah yang berkualitas, diperlukan Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

## II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Perangkat Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2109 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08, Seri E Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
14. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor     ).

### III. SISTEMATIKA RENJA

Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran . Sistematika Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu
BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V	Penutup

### IV. KETENTUAN PENYUSUNAN RENJA

- 1) Kepala OPD melakukan penyempurnaan Rancangan Awal Renja dengan memperhatikan dan mengakomodir :
  - a. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - b. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Pangkalpinang;
  - c. Hasil Musrenbang Kecamatan; dan
  - d. Hasil Forum Konsultasi Publik
- 2) Kebijakan Anggaran Belanja Daerah yang dilakukan, tidak berdasarkan *money follow function* tetapi berdasarkan *money follow program*. Tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata, namun harus didasarkan pada pencapaian program prioritas yang ada di RPD dan atau Renstra perangkat daerah Tahun 2024-2026.
- 3) Pemenuhan belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan ASN, Gaji dan tunjangan PHL, Petugas Kebersihan Kelurahan (Satgas Smile), Honor Pengurus RT/RW, Honor/tali asih TKSK/PSM/Tagana, dan lain-lain di Renja 2024 wajib menganggarkan untuk 12 (dua belas) bulan.
- 4) OPD yang melaksanakan pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar merencanakan penganggaran hibah dan bantuan sosial pada Renja Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring, Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- 5) Pekerjaan *Major Project* dan pekerjaan Inovasi perangkat daerah Tahun 2024 untuk dapat diakomodir dalam Renja Tahun 2024.
- 6) Salah satu prioritas Kota Pangkalpinang pada Tahun 2024 adalah mensukseskan kegiatan pemilihan kepala daerah secara serentak. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024, Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang agar memastikan alokasi anggaran kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam bentuk Belanja Hibah sebesar 60 (enam puluh ) persen dari total Belanja Hibah dianggarkan pada Renja 2024

7) Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappeda dan Litbang, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja, Dinas PPPA dan KB, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan Kecamatan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum (DAU) Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, diminta kepada OPD tersebut di atas untuk menganggarkan Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas dan Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung di Renja 2024 yang ditentukan penggunaannya untuk keperluan:

- a. Penggajian formasi PPPK;
- b. Pendanaan Kelurahan;
- c. Bidang Pendidikan;
- d. Bidang Kesehatan;
- e. Bidang Pekerjaan Umum.

Nomenklatur Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas dan Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022.

8) Pekerjaan pengelolaan, penataan, pemeliharaan tempat pemakaman mulai Tahun 2024 dilaksanakan dan dianggarkan di Dinas Perumahan dan Pemukiman

## V. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dan direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

NO	TUJUAN KOTA PANGKALPINANG	SASARAN KOTA PANGKALPINANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya <i>Good Governance</i>		1. Indeks Reformasi Birokrasi	67,71
		1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1. Nilai SAKIP	63,35
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	81,25
		3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	3. Indeks Kepuasan Masyarakat	84

2.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing		2. Tingkat Kemiskinan	4,25 %
			3. Indeks Pembangunan Manusia	79,89
			4. Tingkat Pengangguran Terbuka	5,72 %
			5. Gini Ratio	0,243
			6. Indeks Kesehatan Masyarakat	0,832
			7. Indeks Pendidikan Masyarakat	0,711
			8. Indeks Pembangunan Gender	93,57
3.	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan		4. Laju Pertumbuhan Ekonomi	5 %
			5. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	600 GgCO <sub>2</sub>
		9. Meningkatkan Produktivitas Sektor Perekonomian Unggulan Daerah	9. LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,85 %
			10. LPE Kategori Industri Pengolahan	5,5 %
			11. Kontribusi Sub Sektor Ekonomi Kreatif terhadap PDRB	19,27 %
		10. Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Daerah	12. Realisasi Investasi	Rp. 500 Milyar
		11. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar	13. Indeks Infrastruktur	90,06
			14. Akses Rumah Layak Huni	97,01 %
12. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	15. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,01		

## VI. FOKUS / TEMA PEMBANGUNAN KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024

“Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik “

RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 merupakan tahun pertama Pelaksanaan RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Oleh karena itu diharapkan pada tahun 2024 semua perangkat daerah dapat konsisten untuk mencapai target program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

## VII. PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024

NO	PRIORITAS KOTA TAHUN 2024-2025	PRIORITAS KOTA TAHUN 2024	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2024	PERANGKAT DAERAH
1.	Akselerasi reformasi birokrasi dan demokrasi daerah	Penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Peningkatan transparansi pengadaan barang dan jasa dan terkendalinya inflasi daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Peningkatan akses data dan informasi, pelayanan publik yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP dan Damkar
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
			Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP dan Naker
			Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesbangpol
Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan			
Pembinaan politik daerah guna kesuksesan pelaksanaan Pemilu	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesbangpol		
2.	Peningkatan kompetensi	Peningkatan Keterampilan	Program Pelatihan Kerja	

	dan ketrampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	dan Keahlian Angkatan Kerja, Khususnya Dalam Teknologi, Informasi dan Komunikasi	& Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas PMPTSP dan Naker
3.	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
			Program Penanganan Bencana	
		Peningkatan pemberdayaan petani dan nelayan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				
Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
4.	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	Terkendalnya harga barang dan tertatanya infrastruktur pusat perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi dan Perdagangan
			Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
		Meningkatkan pemberdayaan dan kapasitas UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan Perdagangan
			Program Pengembangan UMKM	
		Optimalisasi Peningkatan Daya Tarik Investasi Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas PMPTSP dan Naker
			Program Promosi Penanaman Modal	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata			
5.	Peningkatan kualitas tata ruang wilayah berbasis lingkungan	Peningkatan Kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	

## VII. PAGU INDIKATIF RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	TOTAL PAGU (Rp.)*
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	147.848.036.000
2	DINAS KESEHATAN	129.544.052,000
3	RSUD DEPATI HAMZAH	32,129,300,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	64,319,859,000
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	11,266,248,000

6	SATPOL PP DAN DAMKAR	18,759,634,000
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7,948,146,000
8	DINAS SOSIAL	8,118,940,000
9	DINAS PPPA DAN KB	7.349.417.000
10	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	8,941,275,000
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	24,876,386,000
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	5,750,650,000
13	DINAS PERHUBUNGAN	14,917,897,000
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13,510,638,000
15	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN	11,769,244,000
16	DINAS PMPTSP DAN TENAGA KERJA	9,008,440,000
17	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	9,604,330,000
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5,024,776,000
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5,223,242,000
20	DINAS PARIWISATA	8.201.504.848
21	SEKRETARIAT DAERAH	43.566.412.000
22	SEKRETARIAT DPRD	54,594,230,000
23	BAPPEDA DAN LITBANG	8.850.281.775
24	BADAN KEUANGAN DAERAH	48,950,572,000
25	BKPSDMD	6,975,835,000
26	INSPEKTORAT DAERAH	13,233,294,000
27	KECAMATAN BUKIT INTAN	12.231.536.000
28	KECAMATAN RANGKUI	13.286.862.000
29	KECAMATAN GERUNGGANG	11.336.179.000
30	KECAMATAN TAMAN SARI	9.410.843.000
31	KECAMATAN PANGKALBALAM	9.482.254.000

32	KECAMATAN GIRIMAYA	8.387.839.000
33	KECAMATAN GABEK	10.883.121.000
34	BADAN KESBANGPOL	32,372,294,000

Catatan : Pagu Renja 2024 diluar Dana Alokasi Khusus (DAK)

### VIII. LAIN – LAIN

1. Jadwal asistensi / verifikasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan disampaikan kemudian
2. Mekanisme pelaksanaan penginputan Renja 2024 ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI melalui tautan <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> menggunakan mekanisme **RINCIAN BELANJA** (jadwal penginputan akan disampaikan kemudian)
3. Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang berwenang melakukan asistensi dan verifikasi, penilaian efisiensi dan efektifitas, melakukan koreksi terhadap asas kepatutan dan kewajaran terhadap penganggaran setiap sub kegiatan (input) dengan target (output) yang akan dicapai dalam Renja 2024, sesuai dengan **STANDAR SATUAN HARGA (SSH) TAHUN 2024** yang ditetapkan.

### IX. PENUTUP

Hal-hal yang penting dan/atau teknis yang belum diatur dalam pedoman ini, dapat menghubungi dan berkonsultasi langsung dengan Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang.

WALIKOTA PANGKALPINANG,



H. MAULAN AKLIL



